

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENCEGAHAN BENCANA BANJIR DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Muhammad Fadlan Septadinata
NPP.29.0418

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: fadlan.irlansyah30@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): Urban areas often experience flood disasters, this is caused by an unbalanced urban layout where this starts from a development paradigm that is not sustainable development. The flood disaster hit big cities where the spatial layout did not pay attention to the environment. Through the sustainable development of Green Open Space (RTH), it is hoped that the government will continue to carry out development but be safe from the threat of disasters, especially floods. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and analyze the work plan on green open space in the field of the Palembang City Public Works and Spatial Planning Office related to the sustainable green open space development in the city of Palembang in preventing flood disasters. **Method:** Using a research design that is qualitative research with a descriptive inductive approach. And using data analysis techniques, namely data reduction (data reduction), data presentation (data display), and drawing conclusions/verification. **Results:** Green open space is a gift as well as a threat of disaster in urban environments. **Conclusion:** Flood disaster is the most frequent disaster in the city of Palembang, especially when entering the rainy season. This is caused by the topography of the city of Palembang which tends to be flat, many areas have changed functions, the lack of green open space, and the lack of awareness of the people of Palembang to protect the environment.

Keywords: Sustainable Development, Green Open Space, Flood Disaster

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perkotaan sering kali mengalami bencana banjir, hal ini disebabkan oleh tata ruang kota yang tidak seimbang dimana hal ini berakar dari paradigma pembangunan yang bukan pembangunan berkelanjutan. Bencana banjir menerpa kota-kota besar dimana tata ruangnya sudah tidak memperhatikan lingkungan. Melalui pembangunan berkelanjutan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diharapkan pemerintah tetap melaksanakan pembangunan tetapi aman dari ancaman bencana terkhusus bencana banjir. **Tujuan:** Tujuan penelitian untuk Mengetahui dan menganalisis rencana kerja tentang RTH di lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang terkait pembangunan berkelanjutan RTH di Kota Palembang dalam pencegahan bencana banjir. **Metode:** Menggunakan desain penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan

conclusion drawing/verification. **Hasil/Temuan:** Ruang terbuka hijau menjadi sebuah anugerah sekaligus menjadi ancaman bencana di lingkungan perkotaan. **Kesimpulan:** Bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kota Palembang terutama apabila memasuki musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh wilayah topografi Kota Palembang yang cenderung datar, banyak wilayah resapan air telah beralihfungsi, kurangnya RTH, dan kurang kesadaran masyarakat Kota Palembang untuk menjaga lingkungan.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Ruang Terbuka Hijau, Bencana Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Indonesia seperti sebuah koin yang memiliki dua sisi. Disatu sisi Indonesia mendapatkan banyak keuntungan seperti pemanfaatan minyak bumi, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan yang memberikan pendapatan bagi negara dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun disisi lain Indonesia harus siap dengan ancaman yang dapat mengancam keutuhan wilayah dan kehidupan masyarakat. BNPB pada tahun 2020 mencatat telah terjadi sebanyak 2.929 kasus bencana di Indonesia dengan kasus bencana yang beragam dimana bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir sebanyak 1067 kasus.

Menurut data bencana yang dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2020, bencana yang paling banyak terjadi adalah bencana banjir dimana bencana banjir merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri seperti membuang sampah sembarangan, tidak memperhatikan lingkungan dan melakukan pembangunan yang tidak berprinsip kepada pembangunan berkelanjutan. Akibat tersebut maka bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di kota tempat penulis melaksanakan penelitian yaitu Kota Palembang.

Penyebab terjadinya bencana banjir di Kota Palembang tidak hanya disebabkan akibat pembuangan sampah sembarangan saja, melainkan juga dikarenakan ketidakmampuan kondisi alam Kota Palembang dalam menyerap debit air hujan diakibatkan kurangnya Ruang Terbuka Hijau baik berupa taman kota, kolam retensi atau wilayah hijau lainnya dimana Ruang Terbuka Hijau perkotaan seharusnya berfungsi sebagai penyerap air hujan dan mencegah bencana banjir terjadi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

RTH di Kota Palembang harus mengalami peningkatan baik dari segi luas wilayah dan kualitas wilayah melalui pembangunan berkelanjutan yang menjadi tugas dan tanggung jawab lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, namun dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Maka dalam mengatasi permasalahan pencegahan bencana banjir ini akan lebih tepat apabila menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai pedoman pembangunan RTH.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kota Palembang mengatakan bahwa ancaman kebencanaan yang dihadapi Kota Palembang terus berulang setiap tahunnya, minimya RTH pada Kota Palembang menjadi faktor utama, perlu peningkatan luas dan kualitas RTH di Kota Palembang melalui pembangunan yang berprinsip kepada pembangunan berkelanjutan. Data luas lahan yang ada sekarang dan luas lahan minimum yang harus dimiliki Kota Palembang dengan luas kota

400,61 km² dan luas lahan RTH saat ini 40,6 km² (10%) sehingga kekurangan lahan RTH sebesar 80,12 km² (20%).

Kota Palembang kekurangan 20% RTH dari ketentuan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan 30% dari luas wilayah suatu Kabupaten dan Kota adalah RTH, sehingga Kota Palembang memerlukan pembangunan RTH baru dalam upaya pemenuhan RTH agar Kota Palembang dapat keluar dari ancaman bencana banjir. Ancaman kekurangan lahan RTH di Kota Palembang adalah ancaman yang berbahaya. Dampak kebencanaan yang ada akibat kekurangan RTH tidak hanya satu, melainkan seperti efek domino. Dampak kebencanaan yang sangat dirasakan Kota Palembang adalah banjir sehingga ini menjadi permasalahan bersama dalam pembangunan dan peningkatan RTH di Kota Palembang untuk mengurangi titik-titik bencana banjir tersebut.

RTH merupakan unsur wajib dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu wilayah kabupaten dan kota terlebih kota tersebut memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang tinggi seperti Kota Palembang. banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pembangunan RTH, namun dalam pelaksanaannya jumlah ketersediaan RTH masih sangat minim di Kota Palembang. Kurangnya RTH merupakan dampak dari pembangunan Kabupaten dan Kota yang tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penataan ruang. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Palembang terutama lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang yang memiliki tanggungjawab dalam pembangunan dan pemetaan wilayah RTH di Kota Palembang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pembangunan berkelanjutan maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Antara lain, Sari yang berjudul Kajian Ketersediaan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Di Kota Sukabumi Tahun 2015. Penelitian yang menjelaskan tentang pentingnya kajian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi dikarenakan kota sukabumi telah mengalami pengurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semenjak terjadinya urbanisasi besar-besaran dalam satu dekade terakhir di Kota Sukabumi. ketersediaan ruang terbuka hijau Kawasan perkotaan Kota Sukabumi secara keseluruhan belum memadai, yaitu sebesar 1.673.193,20 m² atau 5,20% hal tersebut tidak mencukupi standar minimal ketersediaan ruang terbuka hijau yang dicanangkan oleh pemerintah dalam UU No 26 tahun 2007. Ruang terbuka hijau publik yang terdapat di kawasan perkotaan Kota Sukabumi sebesar 5,07%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kota Sukabumi apabila dilihat dari segi kepemilikan masih belum sesuai dengan kriteria luas ruang terbuka hijau.

Lolom Evalita Hutabarat yang berjudul Studi Penurunan Muka Tanah (LAND SUBSIDENCE) Akibat Pengambilan Air Tanah Berlebih di DKI Jakarta Tahun 2015. Penelitian yang menjelaskan terkait kasus penurunan tanah di DKI Jakarta yang mengalami penurunan secara drastis dan mengancam ekosistem lingkungan. Kondisi ini diperparah dengan semakin naiknya permukaan air laut di perairan utara DKI Jakarta. Sehingga diperkirakan tahun 2050 sebagian DKI Jakarta akan tenggelam. Masalah dan fenomena yang terjadi di kota Jakarta dimana pengambilan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri terus meningkat, diperlukan regulasi yang tepat untuk optimalisasi eksploitasi air tanah pada aquifer tanpa menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah yang berlebihan

Ahmad Jazuli yang Berjudul Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan terkait pembangunan di Indonesia yang harus berlandaskan lingkungan yang asri dan lestari. Dimana pembangunan ini digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya meneliti mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau, penurunan tanah, dan dinamika lingkungan hidup dan SDA. Pada penelitian ini, peneliti ini akan mengaji dan menganalisis Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari sisi pencegahan bencana banjir yang pernah terjadi di Kota Palembang. Metode yang digunakan dengan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi *data (data reduction)*, penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*. Diperkuat oleh teori dimensi Pembangunan Berkelanjutan oleh Rogers (2008) yaitu pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan dan keadilan social.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis rencana kerja tentang RTH di lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang terkait pembangunan berkelanjutan RTH di Kota Palembang dalam pencegahan bencana banjir.

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Penelitian kualitatif pada penelitian ini mengenai studi pembangunan, gerakan organisasi atau hubungan timbal balik. Metode penelitian deskriptif menjelaskan pemahaman mengenai verbal dan numerik terkait kenyataan yang ada di lokasi penelitian. Informan yang digunakan sebanyak 8 orang yang diperoleh dengan *Snowball Sampling* dan *purposive sampling*.

Instrumen Penelitian yang dibutuhkan antara lain Catatan Lapangan (Field Note), Rekaman Wawancara, Pedoman Wawancara, dan Pedoman Observasi.

Teknik pengumpulan data antara lain, data primer adalah sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat di peroleh dengan wawancara, kuisioner. Dan data sekunder adalah data pendukung yang didapatkan dari dokumentasi dilapangan nantinya. Adapun dokumentasi tersebut meliputi : surat-surat, Dokumen, Foto.

Teknik Analisis Data menggunakan reduksi *data (data reduction)*, penyajian *data (data display)*, dan Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembangunan Berkelanjutan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pencegahan Bencana Banjir Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Rogers mengatakan bahwa Pembangunan Berkelanjutan yang baik dan benar wajib memiliki 3 komponen utama dimana fokus pembahasannya berbeda dalam setiap komponen tersebut. Ketiga

komponen tersebut dikategorikan berdasarkan unsur-unsur pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

3.1.1 Lingkungan

Dalam merumuskan sebuah konsep dalam pencegahan bencana banjir di Kota Palembang maka membutuhkan sebuah arah pembangunan yang baik dan benar. Bencana banjir di Kota Palembang merupakan bencana ekologis yang disebabkan ulah manusia khususnya dalam pengaturan tata ruang perkotaan dimana tidak memperhatikan unsur ruang lingkungan di Kota Palembang dan terjadinya alih fungsi lahan. Karena unsur lingkungan tersebut maka diperlukan sebuah regulasi hukum dalam rangka upaya mengatur tata ruang kembali agar tersedianya ruang untuk lingkungan. Regulasi hukum ini berperan sebagai pisau dalam upaya melakukan pembangunan yang berlandaskan berkelanjutan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3.1.1.1 Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang merupakan pedoman dan rencana dasar pelaksanaan suatu arah pekerjaan, target dan cara bertindak. Untuk dapat mencapai tujuan keberhasilan pembangunan berkelanjutan RTH di Kota Palembang maka disusunlah sebuah rencana strategis yang diharapkan dapat sebagai landasan dasar, acuan kerja dan target pembangunan melalui Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa bencana banjir di Kota Palembang adalah hal yang sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Karena RTH Kota Palembang menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang hanya memiliki RTH seluas 10% dari luas minimum 30% Kota Palembang. Sehingga diperlukannya upaya manajemen bencana dalam upaya menghindari bencana banjir tersebut. Upaya manajemen bencana tersebut salah satunya adalah dengan melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan RTH sebagai solusi termurah sekaligus penyebab utama mengapa banjir selalu ada di Kota Palembang.

Adapun saran yang diberikan adalah dalam upaya pemenuhan RTH ini harus bekerja sama dengan OPD yang lain dikarenakan RTH adalah sebuah tugas yang menyangkut wilayah. Sehingga apabila Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan pembangunan RTH namun disisi lain terdapat perizinan yang tidak sesuai dengan standar lingkungan kota dan IMB, maka akan percuma dilaksanakan pembangunan terhadap RTH karena akan terjadinya ketidakseimbangan wilayah yang jauh lebih besar lagi.

3.1.1.2 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan wilayah alam baik yang bersifat alami maupun buatan yang dibuat oleh manusia. Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, RTH terbagi menjadi 2 yaitu RTH Privat dan RTH Publik.

Berdasarkan pada hasil wawancara analisis dari penulis mengenai RTH di Kota Palembang penulis memberi kesimpulan bahwa pemerintah daerah menyadari arti penting dari upaya pembangunan terhadap RTH. Bencana banjir di Kota Palembang yang terjadi sepanjang tahun semakin mengalami peningkatan jumlah titik sebaran banjir dan hampir merata diseluruh kecamatan di Kota Palembang.

Salah satu penyebab dari terjadinya hal tersebut disebabkan oleh lahan RTH Kota Palembang yang belum mencukupi untuk melindungi seluruh bagian Kota Palembang dari ancaman bencana banjir.

RTH memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan bencana banjir terutama di wilayah seperti Kota Palembang yang memiliki demografi wilayah yang datar dimana air cenderung lambat untuk mengalir ke sungai musi. Keadaan ini diperparah ketika curah hujan yang sangat tinggi terjadi di Kota Palembang.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Kota Palembang harus mengejar target pembangunan RTH yang tertuang didalam Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang terutama jenis taman kota dan kolam retensi karena kedua jenis RTH ini memiliki dampak yang besar sebagai pencegahan bencana banjir di Kota Palembang.

1.1.1.3 Manajemen Bencana Catch Men Area

Manajemen Bencana merupakan suatu konsep dasar dalam upaya melindungi nyawa manusia dan keberadaan harta benda dari ancaman bencana. Manajemen Bencana diklasifikasikan menjadi 3 tahapan yaitu manajemen pra bencana, manajemen tanggap bencana dan manajemen pasca bencana.

Berdasarkan pada hasil wawancara analisis dari penulis mengenai manajemen bencana RTH di Kota Palembang. Penulis memberi kesimpulan bahwa konsep pencegahan bencana banjir melalui pemanfaatan RTH jenis taman kota dan kolam retensi sangat tepat dilakukan untuk daerah wilayah kota metropolitan seperti Kota Palembang.

Kota Palembang dalam melaksanakan pencegahan bencana banjir dapat bergantung kepada taman kota dan kolam retensi yang ada dikarenakan wilayah Kota Palembang topografinya datar sehingga air cenderung lambat mengalir ke muara sungai sehingga ketika hujan datang maka harus ditampung terlebih dahulu di kolam retensi dan diserap melalui pepohonan di taman kota yang mana kemudian akan menjadi cadangan air tanah. Secara tidak langsung pembangunan berkelanjutan akan RTH merupakan langkah pencegahan terjadinya bencana banjir di Kota Palembang.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah Pemerintah Daerah Kota Palembang dapat mempercepat pembangunan RTH mengingat jumlah RTH Kota Palembang sekarang baru 9,1%. Sehingga diperlukan percepatan pembangunan berkelanjutan RTH dimana pembangunan tersebut akan menjadi upaya manajemen bencana pencegahan bencana banjir di Kota Palembang.

3.1.2 Keadlilan Sosial

Berbicara mengenai Pembangunan Berkelanjutan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah hal yang bersifat efisien dan efektif. Ketika melaksanakan pembangunan berkelanjutan RTH, maka secara tidak langsung akan memperoleh banyak sekali keuntungan imbas dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Pembangunan berkelanjutan RTH berperan sebagai pencegahan bencana banjir di Kota Palembang, selain itu juga akan memiliki dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di bidang sosial. Melalui memperbanyak pembangunan berkelanjutan terhadap RTH di Kota Palembang, maka akan memberikan dampak positif di bidang sosial secara tidak langsung kepada masyarakat Kota Palembang.

3.1.2.1 Ketercukupan Area Hijau

Kota Palembang adalah wilayah yang hanya memiliki luas wilayah hijau sebesar 9,1%. Selain ini berdampak buruk terhadap lingkungan, area hijau yang sedikit di wilayah perkotaan juga dapat memberikan efek jenuh dan membosankan bagi masyarakat Kota Palembang dimana aktifitas sehari-hari masyarakat Kota Palembang adalah pekerja kantor.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pembangunan Berkelanjutan RTH di Kota Palembang memiliki efek positif bagi Kota Palembang. Selain berperan besar sebagai pencegahan bencana banjir di Kota Palembang. Pembangunan RTH juga memberikan hiburan alam bagi masyarakat Kota Palembang yang jenuh akan kehidupan perkotaan dimana ini menunjukkan sikap adil bagi seluruh masyarakat Kota Palembang. Karena selama ini ruang hijau publik di kota-kota besar seperti Kota Palembang hanya dimiliki di perumahan-perumahan elit saja. Dengan dilaksanakannya pembangunan RTH ini hadir sikap adil bagi seluruh kalangan masyarakat Kota Palembang disamping fungsi utama RTH sebagai pencegahan bencana banjir di Kota Palembang.

Selain itu juga Pembangunan Berkelanjutan RTH yang dilaksanakan di Kota Palembang akan menimbulkan rasa peduli lingkungan bagi masyarakat Kota Palembang karena masyarakat merasakan dan melihat langsung dampak positif dari RTH.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah RTH ini dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek keperluan manusia. Tidak hanya dibangun sebagai area taman yang dipenuhi pohon-pohon. Namun RTH ini dapat dibangun dengan fasilitas seperti tempat duduk sehingga masyarakat bisa menikmati RTH.

3.1.3 Ekonomi berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan RTH tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak pemerintah saja. Pemerintah Kota Palembang mengalami kesulitan dalam upaya pemenuhan RTH sebesar 30% dikarenakan Kota Palembang adalah kota dimana sebagian besar wilayahnya sudah beralih fungsi menjadi wilayah perkantoran, perumahan dan lain-lain. Sehingga dalam upaya pemenuhan RTH yang kurang tersebut, Pemerintah Daerah Kota Palembang harus mengganti untung lahan masyarakat yang lahannya dialih fungsikan menjadi RTH. Sehingga hal ini akan memberatkan keuangan pemerintah. Dalam usaha pemenuhan tersebut, pemerintah berharap ada kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam upaya pemenuhan RTH yang kurang dalam konteks ekonomi keberlanjutan.

3.1.3.1 RTH Private

Berbicara mengenai indikator Pembangunan Berkelanjutan RTH maka pada prinsipnya ini akan melibatkan semua kalangan yang ada di wilayah tersebut. Pemenuhan kebutuhan RTH di Kota Palembang sulit mencapai target apabila hanya mengandalkan pemerintah sebagai aktor utama pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan RTH ternyata tidak hanya dapat dilakukan pemerintah saja, melainkan dapat juga melalui pihak swasta dalam konteks RTH Private. Hal ini memang belum ada regulasi yang mengatur terkait ini, namun besar harapan ketika regulasi terkait ini telah rampung maka akan banyak investor perkebunan yang mau membeli lahan di Kota Palembang atau mengelola lahan milik Pemerintah Kota Palembang untuk diubah menjadi lahan perkebunan. Seperti yang diketahui perkebunan juga memiliki kemampuan untuk menyerap air ke dalam tanah dan menjadi air tanah sehingga RTH Private dapat juga berperan sebagai pencegahan bencana banjir di Kota Palembang.

Adapun saran yang diberikan adalah Pemerintah Kota Palembang agar dapat mengatur regulasi terkait RTH Private sehingga pihak swasta dapat menjadi andil bagian didalamnya. Disamping sebagai pemenuhan RTH Kota Palembang juga akan menyoar kepentingan ekonomi

keberlanjutan dimana akan memberikan keuntungan bagi lingkungan Kota Palembang, masyarakat Kota Palembang dan pihak swasta itu sendiri.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

3.2.1 Faktor Pendukung Pembangunan Berkelanjutan RTH di Kota Palembang

3.2.1.1 Dukungan Pemerintah Daerah

Pembangunan yang dilaksanakan dalam lingkup kota bukanlah sebuah pekerjaan mudah untuk dilaksanakan. Tahapan proses yang harus dilalui sebelum pembangunan itu terjadi merupakan proses yang sangat panjang. Tidak terjadi dalam sehari, satu minggu atau hanya satu bulan. Pembangunan yang dilaksanakan akan melalui banyak tahapan seperti proses perencanaan, penganggaran, pemetaan dan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan RTH di Kota Palembang sangat didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang. Hal ini merupakan wujud nyata dari pencegahan bencana banjir serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Palembang melalui pembangunan berkelanjutan RTH.

Adapun saran yang diberikan berupa Pemerintah Daerah Kota Palembang dapat melaksanakan pembangunan tersebut agar lebih cepat tercapai target pembangunan minimum wilayah RTH.

3.2.2 Faktor Penghambat Pembangunan Berkelanjutan RTH di Kota Palembang

3.2.2.1 Ketersediaan Lahan

Pembangunan Berkelanjutan RTH di Kota Palembang baru mencapai angka terpenuhi sebesar 9,1%. Angka ini tidak hanya disebabkan oleh pembangunan yang lamban dikerjakan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Palembang mengalami kesulitan dikarenakan wilayah yang akan dijadikan sebagai area RTH Taman Kota dan Kolam Retensi telah beralihfungsi dan sebagian besar telah menjadi hak milik masyarakat yang dibuktikan dengan sertifikat tanah. Selain itu juga permasalahan penghambat terjadi ketika tanah milik Pemerintah Daerah Kota Palembang yang akan dialih fungsikan sebagai RTH telah dipenuhi oleh bangunan liar masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan beban anggaran Pemerintah Daerah bertambah dikarenakan masyarakat yang menuntut ganti rugi lahan yang mana lahan tersebut sebenarnya adalah milik Pemerintah Daerah.

Bahwa faktor penghambat pembangunan RTH di Kota Palembang adalah ketersediaan lahan yang kurang disebabkan tata ruang puluhan tahun kebelakang yang memberikan perizinan mendirikan bangunan terhadap wilayah yang seharusnya adalah wilayah RTH dan daerah resapan air.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Kota Palembang dapat memberikan melalui mekanisme regulasi terkait lahan Pemerintah Daerah yang kosong untuk dikelola pihak swasta sebagai area perkebunan sehingga ini akan menjadi RTH Private dan menghasilkan output di bidang ekonomi juga.

3.3 Upaya dalam menghadapi faktor penghambat pembangunan berkelanjutan RTH

3.3.1 Upaya Langsung

3.3.1.1 Penjagaan RTH Kolam Retensi

Pembangunan Berkelanjutan RTH adalah masalah serta sekaligus solusi atas permasalahan bencana banjir di Kota Palembang. Lahan RTH di Kota Palembang hanya 9,1%. Upaya dilakukan pemerintah Kota Palembang dalam upaya pemenuhan kebutuhan RTH minimum sebesar 30%. Namun kendalanya adalah ketika dilaksanakannya pembangunan RTH terdapat kendala dan rintangan. Salah satunya adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan RTH yang minim. Upaya pembebasan lahan terus dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Palembang untuk pembangunan

berkelanjutan RTH, namun upaya tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena terkait perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa upaya langsung yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang melalui penjagaan RTH Kolam Retensi merupakan upaya yang dapat dilakukan sembari menunggu pembangunan terhadap RTH baru dilaksanakan.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah penempatan petugas-petugas penjaga kolam retensi yang juga standby di kolam retensi yang lainnya. Karena petugas penjaga kolam retensi hanya terdapat di 3 kolam retensi dari 46 total kolam retensi di Kota Palembang. RTH kolam retensi tersebut adalah Taman Kambang Iwak, kolam retensi taman polda dan kolam retensi lambidaro.

3.3.2 Upaya Tidak Langsung

3.3.2.1 Dukungan Lintas Instansi

Pencegahan bencana banjir adalah tanggung jawab bersama seluruh organisasi pemerintah. Pencegahan bencana banjir di Kota Palembang melibatkan banyak instansi ketika pelaksanaannya. Terutama apabila RTH kolam retensi sudah tidak sanggup lagi untuk menampung debit air hujan tinggi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Bencana banjir akan tetap terjadi karena disebabkan kelebihan daya tampung RTH kolam retensi di Kota Palembang ditambah luas RTH di Kota Palembang belum mencukupi sehingga beban kerja RTH akan bertambah ketika curah hujan sangat tinggi dan dalam waktu yang lama.

Ketika bencana banjir datang maka Pemerintah Daerah Kota Palembang telah bekerja sama dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan sebagai langkah upaya mencegah terjadinya korban jiwa di wilayah sekitar banjir kolam retensi. Dikarenakan banjir disekitar wilayah RTH kolam retensi tergolong berbahaya karena ketika RTH kolam retensi telah meluap artinya wilayah tersebut sudah mengalami kebanjiran yang cukup dalam mengingat RTH kolam retensi sudah kelebihan volume. Berdasarkan hal itu maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan terhadap RTH, namun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyelamatan ketika bencana banjir datang. Sehingga melalui upaya tidak langsung dukungan lintas instansi akan tercipta sebuah kegiatan untuk pencegahan bencana banjir yang saling melengkapi satu dan lainnya.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah ditambahkannya hotline kontak darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan di website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang atau website BPBD Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat segera dihubungi oleh masyarakat ketika bencana banjir terjadi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan wilayah alam baik yang bersifat alami maupun buatan yang dibuat oleh manusia. Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, RTH terbagi menjadi 2 yaitu RTH Privat dan RTH Publik. Dalam konsep Ruang Terbuka Hijau perkotaan, Ruang Terbuka Hijau tidak hanya berbentuk taman kota. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu taman kota, kolam retensi, taman lingkungan, taman rekreasi, pemakaman umum dan jalur pengaman median. Ruang Terbuka Hijau memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menjaga stabilitas lingkungan di wilayah perkotaan. Melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang disebutkan bahwa suatu wilayah perkotaan Kabupaten dan Kota harus menyediakan luas lahan RTH sebesar 30%.

Adapun tujuan dari pembangunan berkelanjutan RTH sebagai upaya pencegahan bencana banjir di Kota Palembang antara lain: 1) Memenuhi kewajiban pemenuhan lahan RTH sebesar 30% dari luas wilayah Kota Palembang. Kewajiban pemenuhan lahan RTH di perkotaan harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Acuan ini sebagai barometer bahwa pembangunan di wilayah Kabupaten dan Kota tidak diperbolehkan hanya mengacu kepada kepentingan ekonomi saja, melainkan harus memperhatikan kebutuhan lingkungan. 2) Sebagai area mitigasi bencana banjir. Tujuan dari pembangunan RTH tidak hanya sebagai pemanis lingkungan perkotaan saja, melainkan pembangunan RTH didasarkan kepada proses mitigasi bencana banjir. RTH memiliki kemampuan untuk menyerap debit air hujan melalui fungsi pepohonan atau kolam retensi. 3) Sebagai pusat kampanye peduli lingkungan sekaligus sebagai wilayah perekonomian masyarakat. RTH tidak hanya sebagai wilayah yang diperuntukan untuk kepentingan alam saja. Melalui RTH pemerintah dapat melakukan banyak kegiatan sehingga fungsi-fungsi RTH tersebut tidak hanya sebatas sebagai area lingkungan perkotaan dan pencegahan bencana banjir, namun dapat juga sebagai wilayah perekonomian.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan salah satu hambatan dalam melakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang diharapkan memberikan pemahaman cinta lingkungan kepada masyarakat Kota Palembang. Terdapat beberapa wilayah RTH taman kota dan RTH kolam retensi yang masih banyak terdapat sampah rumah tangga. Hal ini menandakan masyarakat belum menjaga lingkungan, akan percuma apabila terus dilaksanakan pembangunan RTH tetapi sampah dimana-mana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan yaitu: 1) Bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kota Palembang terutama apabila memasuki musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh wilayah topografi Kota Palembang yang cenderung datar, banyak wilayah resapan air telah beralihfungsi, kurangnya RTH, dan kurang kesadaran masyarakat Kota Palembang untuk menjaga lingkungan. 2) Pemerintah Daerah Kota Palembang telah membuat regulasi terkait lingkungan sebagai salah satu upaya pencegahan bencana banjir. Regulasi terkait yang dimaksud adalah upaya pembangunan berkelanjutan RTH di Kota Palembang. Upaya tersebut dituangkan kedalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023 yang dijabarkan melalui RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. 3) Pembangunan berkelanjutan RTH sedang dilaksanakan di Kota Palembang namun belum menyentuh target minimal yang diwajibkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni sebesar 30% dari luas wilayah Kabupaten dan Kota.

Adapun saran sebagai diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Kota Palembang sebagai berikut : 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang harus mengupayakan secara maksimal mengejar pembangunan RTH untuk mencapai 30% dari luas minimum wilayah sebagai upaya pencegahan bencana banjir. 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang diharapkan memberikan pemahaman cinta lingkungan kepada masyarakat Kota Palembang. Terdapat beberapa wilayah RTH taman kota dan RTH kolam retensi yang masih banyak terdapat sampah rumah tangga. Hal ini menandakan masyarakat belum menjaga lingkungan, akan percuma apabila terus dilaksanakan pembangunan RTH tetapi sampah

dimana-mana. 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang diharapkan memanfaatkan lahan kosong milik Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dapat dialihfungsikan menjadi RTH. Dalam upaya percepatan mencapai target 30%, Pemerintah Daerah Kota Palembang dapat mengajak pihak ke-3 yang berminat mengolah lahan kosong tersebut menjadi wilayah perkebunan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang tersedia dan biaya yang digunakan untuk penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan untuk dapat melakukan penelitian lanjutan terkait penelitian ini dilokasi berbeda namun membahas mengenai ruang terbuka hijau (RTH) dalam pra bencana.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada orang tua penulis, para dosen pembimbing dan dosen penguji dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penulisan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Esterberg, Kristin G. *Qualitative Methods In Social Research*. New York: McGraw Hill, 2002.
- George R.Terry. *Principle of Manajemen*. Edited by G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Hasan, Erliana. *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2011.
- Khambali, I. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Komariah, Aan, and Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Miller, A., and M Loman. *Measuring and Reporting Sustainability: The Role of the Public Sector*. Edited by Earth Institute. Columbia, 2006.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nurjanah. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Purnomohadi. "Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Pengendalian Kualitas Udara Di DKI Jakarta." Institut Pertanian Bogor, 1995.
- Rogers, PP, Kazi F Jalal, and John A Boyd. *An Introduction to Sustainable Development*. Glendale: Glen Educational Foundation, 2008.
- Salim, and Syahrums. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cipta Pustaka, 2012.
- Sangadji, Etta Mamang, and Sopiah. *Metodologi Penelitian—Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sari. "Kajian Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Sukabumi." *Jurnal Bumi Indonesia* (2015).
- Shirvani, Hamid. *The Urban Design Process*. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1985.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama, 2010.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.

Ahmad Jazuli. “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan.” *Media Pembinaan Hukum Nasional* (2015).

Arifin, Samsul. “Peran Teknologi Penginderaan Jauh Dalam Kebencanaan Di Indonesia.” *Sosialita* 9, no. 1 (2014).

Hutabarat, Lolom Evalita. “Studi Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) Akibat Pengambilan Air Tanah Berlebihan Di DKI Jakarta.” *Kumpulan Karya Ilmiah Dosen Universitas Kristen Indonesia Delapan Windu* (2017).

Ahmad Jazuli, “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan,” *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2015

George R.Terry, *Principle of Manajemen*, 1997

Hutabarat, Lolom Evalita, “Studi Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) Akibat Pengambilan Air Tanah Berlebihan Di DKI Jakarta,” *Kumpulan Karya Ilmiah Dosen Universitas Kristen Indonesia Delapan Windu*, 2017

Ibid, *No Title*, 218M

Indonesia, Pemerintah, “Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,” 2007

Indonesia, Pemerintah Republik, “UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” 2007

Miller, 2006

Sari, “Kajian Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi,” *Jurnal Bumi Indonesia*, 2015

Shirvani, Hamid, “The Urban Design Process,” 1983

Silalahi, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)

“University British Columbia”

Walhi, “Pemkot Palembang tambah ruang terbuka hijau,” *AntaraNews.Com*, 2020

<<https://sumsel.antaraneews.com/berita/457556/walhi-minta-pemkot-palembang-tambah-ruang-terbuka-hijau>> [diakses 1 September 2021]

Wikipedia, “Cincin Api Pasifik - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas”

<https://id.wikipedia.org/wiki/Cincin_Api_Pasifik> [diakses 1 September 2021]

———, “Sejarah Kota Palembang,” hal. 1